

## Degradasi Nilai Persatuan Atas Sikap Politik Identitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Masyarakat Jalan Perjuangan

Priscillia Febrianty Purba<sup>1</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup> Novridah Reanti Purba<sup>3</sup> Egina Shinta Bella Br Ginting<sup>4</sup> Asril Rouli Nilawati Pasaribu<sup>5</sup> Jessica Yolanda Lumbangaol<sup>6</sup> Tiurma Sania V M Munthe<sup>7</sup>

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [pscliapurba@gmail.com](mailto:pscliapurba@gmail.com)<sup>1</sup> [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>2</sup>  
[purbanovri567@gmail.com](mailto:purbanovri567@gmail.com)<sup>3</sup> [gintingbella892@gmail.com](mailto:gintingbella892@gmail.com)<sup>4</sup> [asrilrouli109@gmail.com](mailto:asrilrouli109@gmail.com)<sup>5</sup>  
[jesicamarbun68@gmail.com](mailto:jesicamarbun68@gmail.com)<sup>6</sup> [tiurmamunthe78@gmail.com](mailto:tiurmamunthe78@gmail.com)<sup>7</sup>

### Abstrak

Degradasi nilai persatuan atas sikap politik identitas mempengaruhi dinamika politik dan hasil pemilihan presiden pada pemilu tahun 2024. Hal tersebut akan menjadi momen penting dalam sejarah politik suatu negara. Salah satu aspek yang memainkan peran tersebut dalam proses pemilu nanti adalah nilai persatuan atas sikap politik identitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terhadap degradasi nilai persatuan atas sikap politik identitas. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 10 warga masyarakat di Jalan Perjuangan dengan mengidentifikasi hasil respon masyarakat terhadap polarisasi politik, peran masyarakat sosial dalam menjelang pemilu 2024, respon terhadap penggunaan politik identitas oleh calon-calon presiden yang berkontribusi pada degradasi nilai persatuan ini, dan sikap politik yang dipengaruhi oleh media sosial.

**Kata Kunci:** Degradasi, Poitik Identitas, Pemilu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Degradasi merupakan kemunduran, penurunan, atau kemerosotan dan penurunan nilai dari suatu hal di lingkungan masyarakat. Seperti, penurunan budaya, moral, perubahan sikap dan perilaku. Degradasi atau penurunan nilai ini bisa diperbaiki jika nilai-nilai budaya itu di implementasikan atau diterapkan dengan baik dan kesadaran diri. Pada proses politik di Indonesia agar berjalan dengan baik, diperlukan pemilu. Pemilu dan demokrasi tidaklah sama, tetapi Pemilu adalah konsep nyata dari demokrasi. Dalam pemilu, masyarakat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis (Budiardjo, dalam Astuti 2023: 1770). Politik di Indonesia terdapat pertentangan antara identitas nasionalisme dan identitas agama, suku, budaya, gender dan antargolongan yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Perbedaan pandangan dalam identitas politik melahirkan isu-isu yang ada di masyarakat pada setiap daerah, hal ini karena hadirnya propaganda dan klaim orang-orang terhadap suatu kebenaran. Dalam rangka menjalankan pemilu, politik identitas hadir dengan isu-isu melalui kampanye yang bertujuan untuk mendapat dukungan Masyarakat melalui media. Melalui media massa bisa mengambil dukungan berdasarkan visi dan misi para calon presiden. Dukungan dari masyarakat terhadap calon presiden ditentukan oleh berbagai perbedaan-perbedaan identitas berupa identitas agama, suku, budaya, gender dan antargolongan.

Beranjak dari fenomena tersebut, maka analisis pada seputar maraknya penggunaan politik identitas yang dilakukan oleh para capres, para tim sukses, bahkan para simpatisannya, ketika kita belajar dari sejarah pada peristiwa pilpres tahun-tahun yang lalu (tahun 2014, 2019,

dll), ataupun pilkada di beberapa daerah beberapa tahun yang lalu, betapa tidak efektifnya penggunaan politik identitas dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat demi mencapai cita-cita bersama. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, politik identitas menjadi salah satu isu yang ramai dibicarakan dan akan banyak terjadi. Hal ini karena politik identitas yang berdasar pada identitas yang sama menjadi pilihan bagi Masyarakat. Di era politik modern seperti ini, menguatnya politik identitas dapat menghambat nasionalisme bangsa dan pluralisme Masyarakat. Dalam hal tersebut, konteks pemilu bisa mengancam pelaksanaan pesta demokrasi di suatu negara.

### **Politik Identitas**

Politik identitas mengatur orang-orang di sekitar kepentingan bersama mereka. Hal ini dilakukan dengan adanya persamaan identitas, yang menjadi sumber kekuatan untuk masyarakat dalam menyuarakan suaranya. Politik identitas selalu diperjuangkan karena kelompok orang yang berbeda cenderung memiliki banyak perbedaan, yang dapat menimbulkan konflik (Setyaningrum, dalam Istianah dan Saehudin, 2023:245). Politik identitas mengacu pada pemahaman gagasan filsuf poststrukturalis-postmodernis Prancis, Michel Foucault (dalam Halim, 2023), yang mengkritik konsekuensi-konsekuensi negatif modernisme dan menunjukkan keberpihakannya pada “wacana-wacana yang tertindas” dari “wacana besar” yang mendominasi dan mengontrol, yang kemudian disebut politik identitas (biopolitik) seperti perbedaan-perbedaan tentang politik tubuh (Sabarudin, Halim, 2023). Konsep ini kuncinya adalah perjuangan wacana tertindas terkait perbedaan-perbedaan politik tubuh. Bahwa politik identitas merupakan konsep yang memperlihatkan perjuangan wacana tertindas terkait perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal. Ketika konsep ini ditautkan dengan konsep komodifikasi, maka ia menjelma menjadi sebuah kegiatan produksi dan distribusi komoditas berupa perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal, yang lebih memperhatikan daya tarik agar bisa dipuji oleh orang banyak, tanpa memperhatikan konteks sosial, serta hal yang di implementasikan dalam empat aspek yaitu; isi media, khalayak, pekerja, dan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut politik identitas menuju pada sifat egois dan memaksakan kehendak orang pada kepentingan-kepentingan politik. Politik identitas berupa cara berpikir yang berbeda terfokus pada mengidentifikasi orang dengan kelompok yang berbeda. Ini artinya setiap orang mempunyai kepentingan khusus yang bertujuan untuk melindungi komunitasnya sendiri, dan dilakukan dengan kerja sama dalam mendukung kepentingan orang pada identitas yang sama. Menurut Agnes Heller yang dikutip Rahman (dalam Tatas, 2023), politik identitas merupakan konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya terletak pada perbedaan sebagai kategori politik utama. Pada setiap kelompok, walaupun mereka memiliki ideologi dan tujuan bersama, tidak bisa di tolak bahwa akan ada seseorang atau individu yang berbeda identitasnya.

Pada dasarnya suatu identitas menuju pada sifat egois. Politik identitas tidak terlepas dari makna identitas itu sendiri. Identitas atau jati diri dianggap sebagai sebuah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu (Suparlan, dalam Indrawan dkk, 2023:35). Dalam komunitas atau kelompok tertentu ini tidak terlepas dari adanya rasa persamaan individu yang didasari oleh sebuah identitas. Identitas atau jati diri terdapat identitas gender, agama, suku, budaya, profesi, dan sebagainya. Sehingga suatu individu yang memiliki satu kesamaan identitas akan membentuk sebuah kelompok identitas.

## **Pemilihan Umum**

Standar demokratis pemilu internasional mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Standar pemilu berintegritas menyatakan, pemilu akan diakui dan mempunyai legitimasi politik dan hukum jika dijalankan tepat waktu sesuai jadwal, dengan dijalankannya kerangka hukum pemilu dengan tepat dan tanpa pandang bulu. Kemudian, prosedur yang diterapkan menuju pada terlaksananya integritas pemilu, dan dikedepankan pemilih sebagai manifestasi dari pemangku kedaulatan rakyat, dan pemilu dioperasikan secara jujur dan adil (Wahid, 2016). Hal ini menyatakan bahwa pemilu diakui apabila pemilu tersebut dapat dijalankan dan diatur dengan jujur dan adil melalui kerangka hukum yang ada. Integritas pemilu memberikan suara melalui proses pemilihan dengan dihitung dan direkapitulasi secara terbuka, akurat, efektif akses publik yang memadai, hasil-hasil pemilu sama dengan hal yang dikehendaki rakyat saat menyampaikan hak pilihannya di TPS, partisipasi rakyat pada derajat penilaian memadai, serta tercapainya hasil-hasil pemilu yang mencerminkan setinggi mungkin derajat representasi dari setiap daerah pemilihan (Wahid, 2016). Terwujudnya pemilu yang berintegritas, para penyelenggara pemilu harus berintegritas karena pemilu hasil-hasil pemilu yang diakui harus berintegritas, dimulai dari berintegritasnya para petugas keamanan dan administrator pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demokrasi membutuhkan pemilu untuk berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah dan masyarakat yang ikut serta di dalamnya saling bekerja sama dan mendengarkan untuk memastikan pemilihan umum berjalan sesuai rencana (Istianah dan Saehudin, 2023:233). Orang-orang yang ikut serta dalam urusan politik menentukan bahwa pemerintah diakui secara sah dan dihormati oleh masyarakat. Hal ini karena rakyat yang menentukan calon yang dipilih, dan dapat menggunakan kekuasaan untuk menuju masa depan pemerintahan. Selain itu, rakyat dalam memberikan suara adalah cara rakyat untuk memilih pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah dapat melakukan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Hasil Pemilu ini adalah cara agar dapat mengetahui tujuan dan arah masa depan suatu negara. Demokrasi membutuhkan pemilu untuk membiarkan masyarakat memiliki hak suara dalam menjalankan negara dari suara rakyat. Masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada proses pemilihan umum diimplementasikan dalam bentuk tindakan politik seperti menyalurkan dukungan kepada calon tertentu dengan mengikuti proses memberikan suara pada saat pemilihan umum nantinya. Sikap Masyarakat dalam memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Misalnya, faktor kebijakan dan isu-isu politik, faktor agama, adanya kumpulan orang yang memilih calon tertentu karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya. Selain itu, ada juga orang yang memilih kandidat tertentu karena dianggap mewakili kelas sosialnya. Bahkan ada juga Kumpulan orang-orang yang memilih calon tertentu sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu (Hemay & Munandar, dalam Istianah dan Saehudin, 2023:236).

## **Sikap Politik Dalam Pemilu**

Penyelenggaraan pemilu 2024 yang sulit dan kompleks akan digelar pilpres dan dampak politik dari penyelenggaraan pemilu nasional juga berpotensi menjangkit kepada Masyarakat di atas 17 tahun keatas. Politik identitas dalam sudut pandang sosiologi akan terus hadir dalam politik Indonesia menuju pemilihan presiden 2024. Karakter masyarakat Indonesia belum terlepas dari sikap memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil dan semangat membela suatu kepercayaan yang masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia sekalipun sudah hidup di era modern sekarang. Istilah politik identitas sudah lama diadakan sebagai narasi politik oleh golongan elit politik tertentu di Indonesia sebagai wacana instrumen untuk melukiskan rasa kebencian dan takut kalah pada pihak lawan politiknya agar bisa menurunkan

citra dan menyudutkan figur seseorang yang dapat dinilai kuat dan bertujuan untuk menang, bisa mengalahkan saingan lainnya sehingga perlu disudutkan dengan narasi tidak nasionalisme dan intoleransi seperti diskriminasi. (Perdana, 2023). Para pendukung, kader partai politik hingga peserta pemilu berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan melalui media sosial, kader parpol berharap hal ini dapat meraih pendukung muda yang aktif dalam media sosial. Pergunjungan politik antar partai merupakan hal yang dapat membuat kolom komentar ramai dibicarakan dan menjadi perangkat digital hoax politik Indonesia.

Media sosial adalah salah satu sarana informasi yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat di masa sekarang ini. Media sosial memiliki empat manfaat bagi aktifitas politik suatu partai maupun calon kandidat yaitu sebagai Informasi, pelayanan, akses kekuatan politik dan ruangan. (Berliani Ardha, 2014:108). Dalam hal ini media sosial penting bagi partai politik untuk mengusung atau mempromosikan informasi calon dari suatu partai kepada masyarakat. Pada keterlibatan politik, melalui kampanye, semakin signifikan penggunaan media massa dan media sosial di Indonesia. Media massa membuat ramai pembicaraan politik, mulai dari parade paramiliter, dan orasi para pembicara. Namun, dengan keramaian di media massa tersebut meredup digantikan dengan platform digital, dengan adanya media sosial yang memiliki arena baru dalam pertarungan politik untuk berkampanye dan mempengaruhi publik dalam memilih kandidat. Kemudian, munculnya penyalur kekuasaan media. Hadirnya media sosial tidak mengubah peta oligarki kepemilikan media, baik cetak, radio, ataupun televisi, namun justru menciptakan penyalur informasi yang beragam dan dapat disampaikan secara langsung untuk menyebarkan informasi kepada sebagian besar netizen (Sholilah, 2022). Penggunaan internet memberikan suatu ruang pilihan dalam representasi fisik individu tidak menjadi syarat utama dalam menunjukkan partisipasi politik. Hal ini dimanfaatkan para politik untuk melakukan tugasnya, serta terbukti dalam kasus-kasus yang memiliki dampak positif dari aktifitasnya di media sosial yang memberikan rasa nyaman pada peningkatan partisipasi politik di publik pada saat proses pemilu. (Sholilah, 2022). Dalam melakukan peran untuk menunjukkan partisipasi politik dibuktikan melalui adanya penggunaan internet dalam memberikan informasi kepada Masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell dalam bukunya *Research Design*, Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami makna pada sejumlah orang atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara. Struktur wawancara pada penelitian ini berada pada wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur dengan menanyakan berbagai pertanyaan ditujukan kepada 10 masyarakat jalan Perjuangan dengan bebas dalam urutan manapun. Peneliti mewawancarai Masyarakat dengan tiga pertanyaan yang sama. Peneliti mempunyai catatan sendiri yaitu tujuan penelitian dan pertanyaan yang dimiliki berdasarkan isu tertentu dan mendapatkan hasil jawaban yang akan digali. Setiap responden memiliki jawaban yang berbeda. Responden bebas untuk menjawab, baik isi maupun panjang pendeknya jawaban, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci. Penelitian ini ditujukan kepada Masyarakat jalan Perjuangan yang akan melaksanakan dan akan melakukan pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti Penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini ditujukan kepada Masyarakat jalan Perjuangan yang akan melaksanakan dan akan melakukan pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti, Adapun responden yang kami lakukan terhadap 10 orang Masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Jl. Perjuangan. Hal ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang berkontribusi terhadap degradasi nilai persatuan atas sikap politik identitas. dengan menunjukkan bahwa polarisasi politik yang semakin meningkat, peran media sosial dalam memperkuat politik, dan penggunaan politik identitas oleh calon-calon presiden telah berkontribusi pada degradasi nilai persatuan ini. Selain itu, terlihat juga bahwa isu-isu identitas seperti etnis, agama, dan gender seringkali digunakan untuk memecah belah pemilih dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat.

### Respon Masyarakat Perjuangan Menjelang Pemilu 2024

**Tabel 1. Respon Masyarakat Perjuangan Menjelang Pemilu 2024 agar Tercapai dengan Baik**

Responden	Tanggapan
Nassar Lubis	Bersikap Jujur dan tidak ada kecurangan dalam pemilu 2024 nantinya
Sera	Tergantung presidennya bagaimana sikap nya. Bagi Masyarakat itu tergantung pribadinya sendiri.
M. Siagian	Dari pemerintah, harus lebih menjaga ketertiban, keamanan. Karena pemilu dulu, beberapa daerah tidak ada petugas keamanan untuk menertibkan pemilu
Aljun	Kita harus melihat visi misi calon pemilu. Kalau kita melihat dan memahami visi misi calon presiden apakah nanti bisa terwujud seperti pembangunan itu terlaksana nanti
Suryanto	TPS dijaga dengan baik, dan jangan ada kecurangan
M. Sitorus	Kita memilih sesuai dengan hati Nurani kita. Tidak terpengaruh dengan orang lain dan tanpa paksaan orang lain
Yani	TPS dijaga dengan keamanan yang baik
Sanni	Struktur pemilihan umum tersebut harus lebih pas, seperti kotak suara yang hilang, kurang dan datanya yang kurang atau hilang lebih diperhatikan. Seperti dalam hal pemungutan suara, KTP harus lengkap agar tidak ada kecurangan
Riva	Pengurus suatu pemilu harus memiliki sikap yang jujur. Masyarakat nantinya lebih menjaga kerukunan dan toleransi antar umat.
Rizky	Koordinasi antar atasan dan bawahannya yang sinkron, dan adanya kejujuran. Tidak adanya suap dan uang uang kotor nantinya

Pada penelitian ini masyarakat jalan perjuangan menuju pemilu 2024 ditujukan kepada kepada 10 responden yang ikut serta memilih presiden di tahun 2024, dengan wawancara yang dilakukan oleh kelompok peneliti, menemukan bahwa mereka memiliki rasa peduli dengan pemilu 2024 nanti dan sudah menemukan peran mereka menuju pemilu 2024 ini, Peran masyarakat jalan Perjuangan dapat memaknai apa itu demokrasi atau pun pemilu, mereka memiliki pendapat mereka masing-masing agar pemilu 2024 nantinya dapat terselenggara dengan baik. Dalam memilih perlu kita ketahui bahwa masyarakat memilih kandidat presiden berdasarkan pada visi dan misi calon presiden yang cocok untuk memimpin negara Indonesia, namun ada juga yang masih tergantung pada orang lain dalam memilih. Seharusnya sebagai warga negara kita memilih pemimpin kita bukan karena ikut-ikutan dengan orang lain, tapi kita harus memilih dengan mengikuti hati nurani sendiri. tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Berdasarkan pendapat dari masyarakat jalan perjuangan, pemilu nantinya perlu memiliki keamanan agar ketertiban dalam pemilu terjalin dengan baik. Seperti, dalam pemilu, TPS di jaga dengan baik dan tidak ada kecurangan. Hal itu benar, didalam pemilu perlu adanya kejujuran. Pengurus suatu pemilu harus memiliki sikap yang jujur dan dapat menjaga kerukunan. Kemudian struktur pemilihan umum tersebut harus lebih tepat, seperti kotak suara yang hilang atau datanya yang kurang lebih diperhatikan. Dalam pemungutan suara agar pemilu terjalin dengan baik, Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus lengkap agar tidak ada kecurangan Dalam Pemilu perlu adanya sikap yang jujur agar pemilu nantinya dapat terjalin dengan baik. Adapun Peran Masyarakat Jalan Perjuangan menjelang pemilu presiden 2024;

1. Meningkatkan kesadaran politik. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran politik dengan berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti diskusi, atau kampanye. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami isu-isu politik dan mengambil keputusan yang rasional dalam memilih pemimpin.
2. Partisipasi politik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik dengan mendaftar sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya, Partisipasi politik yang tinggi dapat memperkuat demokrasi dan menjalankan kedaulatan rakyat.
3. Menjaga kerukunan dan toleransi. Masyarakat harus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat, apapun perbedaan preferensi politik. Hal ini penting untuk mencegah konflik dan disintegrasi sosial.

### **Degradasi Pengaruh Budaya Terhadap Nilai Persatuan Atas Sikap Politik Identitas Pada Masyarakat Jalan Perjuangan**

**Tabel 2. Respon Masyarakat Jalan Perjuangan Terhadap Nilai Persatuan Atas Sikap Politik Identitas**

Responden	Tanggapan
Nasar Lubis	Indonesia ini negara kesatuan yang memiliki beragam agama dan etnis. Saat kita memilih kita harus memilih berdasarkan visi dan misi. Tidak baik jika memilih berdasarkan agama dan etnis
Sera	Ia mendukung bukan karena hati nuraninya, dan ia masih egois dalam agama, etnis makanya dia memiliki sikap politik seperti itu.
M. Siagian	Negara kita adalah negara demokrasi. Negara kita menuju negara maju, jadi pemikiran kita harus lebih maju, jangan berpikiran bahwa agama, suku, budaya yang sama maka dia yang dipilih. Itu bukan pemikiran yang nasional. Karena, siapapun itu presiden dinilai bukan dari identitasnya, tetapi kita harus lihat bagaimana karakternya, apakah cocok menjadi presiden. Jadi kita harus berpikiran nasional.
Aljun	Kita adalah negara Bhineka Tunggal Ika. Kita memilih presiden bukan dari identitasnya, tetapi dari prestasi baik dari sebelumnya, seperti bagaimana dia bekerja, dan kinerjanya yang layak.
Suryanto	Tidak boleh itu, karena kita memilih harus karena kinerjanya. Bukan identitasnya.
M. Sitorus	Tidak baik memilih karena identitasnya. Mau Kristen atau islam tidak bisa karena suku atau budaya. Kita memilih karena identitas itu. Jadi pilihlah sesuai hati rakyat yang pemimpinnya itu dapat mengayomi rakyat tanpa memikirkan identitasnya. Pilihlah pemimpin yang menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yani	Politik identitas hal yang salah karena kita memilih harus karena kinerjanya
Sanni	Negara kita beragam, tidak benar meimilih berdasarkan siapa dia, tetapi kita lihat visi misi yang baik untuk Indonesia yang lebih baik.
Riva	Politik identitas itu pemikiran yang sempit, tidak berjiwa nasional. Itu tidak benar.
Rizky	Apapun suku atau budayanya, itu tidak menjamin Indonesia maju, tapi bagaimana presiden itu bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik.

Degradasi merupakan penurunan budaya yang yang terjadi di lingkungan. Budaya bisa mempengaruhi nilai persatuan dalam sikap politik menjelang pemilu 2024. Memang budaya bisa membentuk nilai dan norma yang dianut masyarakat. Budaya yang menjunjung tinggi solidaritas dapat mendorong masyarakat untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan pilihan politik. Di sisi lain, budaya yang eksklusif dan berorientasi pada perbedaan dapat mendorong masyarakat menjadi intoleransi dan sentimental. Budaya toleransi dapat mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan pilihan politik. Pada penelitian ini ditemukan bahwa politik identitas merupakan degradasi pengaruh budaya dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2024. Respon Masyarakat jl perjuangan memiliki respon positif dalam menghadapi pengaruh budaya terhadap politik identitas. Politik identitas adalah hal yang salah karena dapat mendukung calon kandidat bukan karena hati nuraninya,

melainkan adanya sikap yang egois dalam budaya saat ini. Pemikiran kita harus lebih maju dan tidak berpikiran sempit bahwa agama, suku, budaya yang sama maka dia yang akan dipilih. Karena itu bukanlah pemikiran yang rasional. Karena, siapapun itu presiden dinilai bukan dari identitasnya, tetapi dapat dilihat melalui karakternya, apakah ia cocok atau tidak menjadi presiden. Jadi kita harus berpikiran rasional, jangan berpikiran fanatik dan ortodok, karena itu adalah hal yang salah. Kita memilih presiden bukan dari identitasnya, tetapi dari prestasi baik dari sebelumnya, seperti bagaimana cara dia bekerja, dan kinerjanya yang layak. Hal ini karena negara kita memiliki semboyan bhineka Tunggal ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu bangsa. Jadi, memilih harus sesuai hati rakyat dan yang dipilih ialah pemimpin yang dapat mengayomi rakyat tanpa memikirkan identitasnya. Kita memilih presiden yang menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia dengan demikian kita perlu menghargai perbedaan pilihan politik, apapun budayanya tanpa membeda-bedakannya.

### Respon Masyarakat Jalan Perjuangan dalam Menilai Sikap Politik Menjelang Pemilu 2024 yang Dipengaruhi oleh Media Sosial

**Tabel 3. Respon Masyarakat Jalan Perjuangan dalam Sikap Politik Menjelang Pemilu 2024 yang Dipengaruhi Oleh Media Sosial**

Responden	Tanggapan
Nasar Lubis	Saya lebih mengikuti keluarga. Ketika keluarga memilih calon tersebut, maka saya lebih mengikuti pilihan yang dipilih orangtua saya
Sera	Kalau untuk media sosial, bagi saya, saya tidak mempedulkannya. Yang terpenting memilih dan tau presidennya itu bagaimana. Jadi tidak perlu diperdulikan.
M. Siagian	Banyak pastinya orang yang menjatuhkan atau menjelek-jelekan di media-media itu, tetapi memang kalau presidennya tidak berbobot buat apa jadi presiden? Nah, tapi Kita lihat bagaimana kepemimpinannya.
Aljun	Itu adalah hak kita sebagai warga negara untuk mengkritik di media sosial. Karena dia menjadi seorang presiden itu karena suara rakyat. Jadi jika dia melakukan kesalahan dalam bekerja itu wajar dikritik karena itulah hak kita sebagai warga negara.
Suryanto	Itu sesuai kehendak dia mau menjatuhkan, dan beropini di media sosial.
M. Sitorus	Siapaun pemimpin nantinya itu adalah pilihan Tuhan. Jadi jangan jadikan itu menjadi hal untuk menjatuhkan presiden melalui media sosial.
Yani	Media sosial tidak semua benar, jadi sebelum kita memposting sesuatu, kita harus telusuri dulu kebenarannya. Dan kita jangan mudah percaya pada segala isi media sosial.
Sanni	Itu adalah hak mereka untuk beropini, namun kita harus pandai menyaring berita-berita itu.
Riva	Informasi yang ada di media sosial cepat kita temukan, namun tidak semua benar. Kita harus pandai menyaringnya
Rizky	Lebih menghargai perbedaan pilihan politik. Tidak perlu memberikan isu-isu yang tidak benar.

Berikut adalah beberapa degradasi pengaruh budaya terhadap nilai persatuan atas sikap politik identitas menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang dipengaruhi oleh media sosial:

1. Munculnya kampanye politik yang memecah belah masyarakat berdasarkan agama. Hal ini terlihat dari kampanye politik yang menggunakan isu-isu agama untuk menyerang calon presiden yang berbeda agama.
2. Munculnya ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti kelompok agama dan suku bangsa.
3. Munculnya aksi-aksi kekerasan yang dilatarbelakangi oleh politik identitas. Hal ini terlihat dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan salah satu calon presiden.

Masyarakat Jl. Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, menunjukkan berbagai respon dalam menilai sikap politik menjelang pemilu 2024 yang dipengaruhi oleh media sosial. Beberapa respon yang terlihat di antaranya Ada yang percaya bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang baik untuk menyampaikan informasi dan pendapat tentang politik. Media sosial juga menjadi sarana untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat mengenai politik tetapi tidak semua informasi itu akurat, maka informasi itu perlu disaring dan dicari tahu kebenarannya. Ada yang percaya bahwa media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan luaskan informasi yang tidak benar tentang politik. Informasi yang tidak benar ini dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap politik. Ada yang percaya bahwa media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan polarisasi politik di masyarakat. dan Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang memecah belah masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Masyarakat Jalan Perjuangan, menunjukkan berbagai respon dalam menjelang pemilihan presiden 2024. Respon-respon ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran politik masyarakat, degradasi pengaruh budaya, dan penggunaan media sosial. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat jalan perjuangan dapat menjelaskan bahwa Politik identitas ini adalah hal yang tidak benar dikarenakan memiliki cara berpikir yang terfokus pada identitas individu. Ini dapat mencakup hal-hal seperti etnis, agama, dan antargolongan. Hal demikian menjadi semakin penting dalam pemilihan presiden karena dapat mempengaruhi keputusan yang diambil rakyat dalam memilih. Dengan demikian, pertarungan politik di Indonesia, baik nasional maupun lokal, jika bernuansa politik identitas juga akan menuju pada populisme dengan sentimen agama. Politik identitas harus diubah menjadi politik kebangsaan, politik negara yang tidak menerapkan sikap egoisme. Pemerintah dan masyarakat dapat menjaga kepentingan dalam tercapainya demokrasi di Indonesia melalui memberikan upaya pencegahan untuk menyaring isu-isu politik identitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, D., Agustang, A., & Idrus, I. I. (2023). Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(6), 1769-1778.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. third Edition, Terjemah, Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, S. (2023). Komodifikasi Politik Identitas dalam Program Catatan Demokrasi di Stasiun TvOne. *Ideology Journal*, 8(1), 13-27.
- Indrawan, J., Rahmawati, R., Ilmar, A., & Yuliandri, P. (2023). Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 14(1), 31-55.
- Istianah, Ratna, dan Saehudin. 2023. Politik Identitas Dan Perilaku Politik Kiai Di Kota Sukabumi Menjelang Pemilihan Umum 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 4(2), 233-250.
- Perdana, A. P. (2023). Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(02), 225-240.
- Resmiwaty, R. (2010). Degradasi Kultural Dalam Kehidupan Remaja. *Academica*, 2(1).
- Samsudin, Dian Askahabul Yani, Bambang Wahyu, Ferri Buchori Muslim, Johendi, Deni Setiawan. (2000). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Sholihah, A. (2022). Buzzer: Politic's Interest And Masalahah:-. Politea: Jurnal Politik Islam, 5(2), 40-84.
- Sompa, A. T., & Al Syahrin, M. N. (2023). Mereduksi Money Politics Dengan Penguatan Nilai Ideologis Pancasila Bagi Masyarakat Di Indonesia. Walagri Kebangsaan, 1(1), 18-28.
- Tatas, H. L. (2023). Politik Identitas Di Tahun Politik 2024. Jurnal STIKOM Semarang| Semai Komunikasi, 6(1), 1-14.
- Wahid, A. (2016). Kode etik peserta pemilu sebagai penguatan demokrasi di Indonesia.
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Lemhannas RI, 9(4), 117-124.